

MEMO HUKUM *HUKUM PERBANKAN*

ANDI SETYAWAN

**USAHA BANK TANPA IZIN (BANK GELAP)
DITINJAU DARI SEGI
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA**



KK.

Pid. 701/96

*Set
M*

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1996**

**USAHA BANK TANPA IZIN (BANK GELAP)
DITINJAU DARI SEGI
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA**



MEMO HUKUM

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing,

**WURYANINGSIH, S.H., M.S.
NIP. 130517141**

Penyusun,

**ANDI SETYAWAN
NIM. 039113408**

TELAH DIUJI :

Hari : Kamis

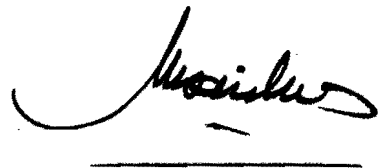
Tanggal : 28 Juli 1995

TIM PENGUJI :

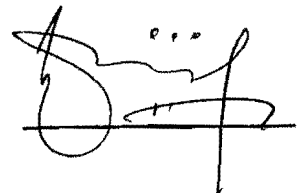
1. Ketua : SAMPE RANDA TUMANAN, S.H., M.S.
NIP. 130317798



2. Sekretaris : M. ZAIDUN, S.H.
NIP. 130517145



3. Anggota : WURYANINGSIH, S.H., M.S.
NIP. 130517141



Sebagai pencegahan atau usaha secara preventif terhadap praktek - praktek perbuatan pidana bank tanpa izin yaitu dengan memperketat tentang syarat - syarat dan tata cara pendirian Bank Umum Swasta, Bank Tabungan Swasta, Bank Pembangunan Swasta serta diadakan tukar menukar informasi antar Bank Indonesia dengan pihak kepolisian atau kejaksaan, khususnya informasi sehubungan dengan personal records.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Yang dimaksud perbuatan pidana bank tanpa izin adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh suatu bank, badan atau perorangan yang melakukan usaha serupa bank, tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Keuangan (berdirinya bank tersebut tanpa prosedur yang resmi).
- b. Istilah yang oleh umum digunakan dalam masyarakat untuk pengertian perbuatan pidana bank tanpa izin adalah bank gelap atau bank liar.
- c. Perbuatan pidana bank tanpa izin mengenai ketentuan hukumnya diatur didalam pasal 46 Undang - undang No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan.

- d. Perbuatan pidana bank tanpa izin dilakukan dengan cara - cara antara lain dengan menggunakan rekening atas nama sendiri atau atas nama orang lain atau atas nama seseorang yang fiktif, dengan cara memberikan cek mundur sebagai tanda terima atau tanda setoran pada pihak penyeter, dengan cara memberikan jaminan berupa cek mundur, jaminan surat berharga atau jaminan terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak oleh pihak kedua (debitur).
- e. Usaha - usaha secara represif dilakukan dengan mengadakan penuntutan dimuka sidang pengadilan berdasarkan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 46 Undang - undang Perbankan Tahun 1992. Terhadap lembaga bank dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 Undang - undang No. 7 Tahun 1992. Sedang terhadap usaha preventif dapat dilaksanakan dengan menjalin kerjasama antara bank dengan pihak kepolisian atau kejaksaan serta memperketat tata cara pendirian bank - bank baru.
- f. Praktek - praktek perbuatan pidana bank tanpa izin yang selain dapat menggoncangkan ketertiban

dan ketentraman masyarakat dapat juga menggonggongkan tata hukum yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu perlu diciptakan secara khusus dan mantap sarana - sarana pencegahannya.

2. Saran

- a. Sehubungan dengan praktek - praktek perbuatan pidana bank tanpa izin, therapi secara kongkret dan kontinyu terhadap usaha - usaha pencegahan perbuatan pidana bank tanpa izin tersebut dapat dilakukan dengan pengawasan oleh Bank Indonesia, hendaknya dengan mempertajam bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Perbankan No. 7 Tahun 1992.
- b. Memperbaiki sarana perbankan agar tercipta kondisi untuk bekerja atas dasar asas - asas perbankan yang sehat.
- c. Agar dimasa - masa yang akan datang prosedur untuk memperoleh kredit pada bank dapat diciptakan secara lunak dan praktis tanpa berbelit - belit, tetapi terjamin secara komtabilitas khususnya bagi para pengusaha lemah dan mereka yang betul - betul membutuhkan jasa - jasa perbankan.
- d. Agar oknum perbankan ditindak secara hukum dan secara administratif apabila terbukti melakukan praktek - praktek kolusi dan menyulitkan

pemberian kredit.